



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE



Laporan Tahunan

Annual Report

2025

*Penguatan Peran Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam Menjawab Tantangan Akuntabilitas Publik dan Dinamika Global*

Laporan Tahunan KSAP

dari tahun ke tahun

1



Laporan Tahunan 2024

*Akselerasi Penyelesaian
Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam Rangka
Meningkatkan Transparansi
dan Akuntabilitas Laporan
Keuangan Pemerintah*

2



Laporan Tahunan 2023

*Percepatan Penyusunan
Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam
Memenuhi Tuntutan
Perubahan, Kebutuhan
Pemangku Kepentingan, dan
Kesesuaian dengan Standar
Internasional*

3



Laporan Tahunan 2022

*Percepatan Penyusunan
Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam
Memenuhi Tuntutan
Perubahan, Kebutuhan
Pemangku Kepentingan, dan
Kesesuaian dengan Standar
Internasional*

Tim Penyusun

Pengarah - Sumiyati (Ketua Komite Kerja KSAP)

Penanggung Jawab - Esti Dwi Arvina (Kasubdit SAP)

Pemimpin Redaksi - Achmad Fauzi (Kepala Seksi FKSAP)

Kontributor - Satria Mahardika - Eka Rizkia Nabila

SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Ketua Komite Konsultatif KSAP



**Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Yang terhormat para pengguna Standar
Akuntansi Pemerintahan**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi KSAP untuk semakin memperkuat peran strategisnya dalam merespons berbagai dinamika, baik di tingkat nasional maupun global. Setelah melalui fase percepatan penyusunan dan penyelesaian standar pada tahun-tahun sebelumnya, fokus KSAP saat ini tidak hanya tertuju pada ketersediaan standar, tetapi juga pada bagaimana standar tersebut mampu menjawab tantangan akuntabilitas publik yang semakin kompleks.

Perkembangan dunia menunjukkan bahwa tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat. Pemangku kepentingan tidak lagi hanya membutuhkan informasi yang andal, tetapi juga relevan, komprehensif, dan mampu mencerminkan kondisi serta kinerja pemerintah secara utuh. Di sisi lain, dinamika global, termasuk perkembangan praktik terbaik internasional dan isu-isu baru seperti keberlanjutan, turut mendorong perlunya adaptasi yang tepat dalam pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, tema laporan tahun ini, yaitu “Penguatan Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menjawab Tantangan Akuntabilitas Publik dan Dinamika Global”, mencerminkan komitmen KSAP untuk terus meningkatkan kualitas standar yang tidak hanya selaras dengan kebutuhan nasional, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan internasional secara proporsional.

KSAP menyadari bahwa peran standar akuntansi pemerintahan tidak berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh implementasi yang konsisten, pemahaman yang memadai dari para pemangku kepentingan, serta sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, ke depan, penguatan tidak hanya dilakukan pada aspek perumusan standar, tetapi juga pada pengembangan pedoman, interpretasi, serta dukungan terhadap penerapan di lapangan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas KSAP, baik Kementerian Negara/Lembaga, Akademisi, Praktisi, maupun Mitra Internasional. Dukungan dan kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas dan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian dan arah pengembangan KSAP ke depan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Januari 2026
Ketua Konsultatif KSAP,



Astera Primanto Bhakti

“Penguatan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan fondasi penting dalam menjawab tuntutan akuntabilitas publik yang semakin kompleks, sekaligus memastikan praktik pelaporan keuangan pemerintah tetap relevan di tengah dinamika global”



SUMIYATI

Ketua Komite Kerja KSAP

Salam sejahtera bagi seluruh pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dapat menorehkan berbagai capaian penting sepanjang tahun 2025. Dengan mengusung tema “Penguatan Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menjawab Tantangan Akuntabilitas Publik dan Dinamika Global”, KSAP terus berkomitmen memperkuat kualitas dan relevansi Standar Akuntansi Pemerintahan agar mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika yang terus berkembang.

Sepanjang tahun 2025, KSAP berhasil mencatat sejumlah capaian strategis. Salah satu capaian utama adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2025 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 20 Agrikultur, yang memperkaya kualitas pelaporan keuangan pemerintah, khususnya terkait aset biologis.

Dalam rangka memastikan standar yang ada tetap relevan dengan kebutuhan sektor publik dan perkembangan praktik internasional, pada tahun 2025 KSAP telah menyelesaikan penyusunan lima draf PSAP untuk kemudian diproses pengesahannya melalui pengajuan RPMK dan melanjutkan proses revisi Kerangka Konseptual serta tujuh PSAP lainnya.

Selain penyusunan dan penyempurnaan standar, KSAP juga terus memperkuat dukungan implementasi SAP berupa: (1) konsultasi penerapan SAP kepada instansi pemerintah, yang kemudian dibukukan dalam Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025, (2) pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion, Sosialisasi, dan Training of Trainers terkait PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan 19 Pengaturan Bersama di lima daerah guna memperkuat pemahaman dan kesiapan implementasi standar baru. dan (3) publikasi karya tulis, artikel ilmiah, serta berbagai konten edukatif terkait SAP dan kegiatan KSAP melalui laman dan media sosial (Instagram) KSAP.

Demikian laporan capaian kinerja KSAP Tahun 2025. Berbagai tantangan berhasil dihadapi dan sejumlah capaian penting telah diraih. Ke depan, KSAP akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat semakin berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif, serta mampu menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan dinamika global.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KSAP.

Peran aktif para pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam mendorong pencapaian kinerja KSAP secara optimal. Ke depan, kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung peningkatan kualitas standar akuntansi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan selaras dengan praktik terbaik internasional.

Jakarta, Januari 2026
Ketua Komite Kerja KSAP,



Sumiyati

“Tahun 2025 menunjukkan komitmen KSAP untuk tidak hanya mempercepat penyelesaian Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga memastikan kualitas, relevansi dan kesiapan implementasinya dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara”

Daftar Isi



**Sambutan Ketua
Komite Konsultatif**



**Laporan Ketua
Komite Kerja**



Daftar Isi



Executive Summary



**Kaleidoskop
Tahun 2025**



**Profil dan
Keanggotaan KSAP**



**Produk KSAP dan
Proses Penyusunan SAP**



**Capaian Kinerja
KSAP Tahun 2025**



Mengenal PSAP Baru

Executive Summary

Penguatan Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menjawab Tantangan Akuntabilitas Publik dan Dinamika Global

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam memperkuat peran strategis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai fondasi akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas kualitas informasi keuangan serta dinamika global yang mendorong harmonisasi standar, KSAP memfokuskan upaya pada percepatan penyusunan dan penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan secara internasional.

Capaian Strategis Tahun 2025

Pada tahun ini, KSAP mencatat sejumlah capaian utama yang berdampak signifikan, antara lain:

- Penetapan PSAP 20 Agrikultur melalui PMK Nomor 85 Tahun 2025, yang memperkuat keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi dalam penyajian dan pengukuran aset biologis negara.
- Penyelesaian draf final PSAP Imbalan Kerja serta PSAP Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi yang siap diproses dalam tahapan penetapan regulasi.
- Finalisasi pasca pertimbangan BPK terhadap PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian, PSAP Instrumen Keuangan, dan PSAP Instrumen Keuangan-Pengungkapan, sebagai bagian dari pengaturan standar mengenai instrumen keuangan yang komprehensif.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KSAP dalam meningkatkan relevansi dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah, sekaligus mendukung harmonisasi bertahap SAP dengan praktik internasional.

Tantangan dan Respons Strategis

KSAP menyadari bahwa percepatan pengembangan standar dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas transaksi sektor publik, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan pengelolaan perubahan dalam implementasi standar baru. Untuk merespons hal tersebut, KSAP memperkuat:

- koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO), Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi;
- pendekatan adaptif dalam pengembangan standar yang memperhatikan karakteristik nasional dan dinamika global;
- dukungan implementasi melalui sosialisasi, konsultasi teknis, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan.

Arah Ke Depan

Ke depan, KSAP berkomitmen untuk terus mengembangkan SAP yang adaptif dan berorientasi pada nilai tambah bagi akuntabilitas publik. Prioritas diarahkan pada penyelesaian PSAP strategis, penguatan tata kelola pengembangan standar, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan kolaborasi yang berkelanjutan, SAP diharapkan semakin berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

01

Kaleidoskop Tahun 2025

Januari

Pada bulan Januari 2025, KSAP menyelenggarakan satu kali Rapat Pleno Komite Kerja dengan agenda pembahasan Pelaporan Capaian Tahun 2024 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan satu kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan mengenai penyusunan rencana masing-masing Tim Kecil Penyusun PSAP.

Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda konsultasi mengenai Implementasi Standar Akuntansi di pemerintah daerah.

Februari

KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak tiga kali dengan agenda pembahasan draf Revisi PSAP 07 Aset Tetap, draf PSAP Imbalan Sosial dan draf Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan tiga kali Rapat Tim Kecil dengan rincian dua kali Tim Kecil Penyusun PSAP Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas serta satu kali Tim Kecil Penyusun PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran.

Pada bulan Februari 2025, juga telah dilaksanakan Sosialisasi PSAP Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama secara daring dengan peserta seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi di seluruh Indonesia. Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan dari Delegasi *General Court of Audit* (GCA) Saudi Arabia dalam rangka *study visit* dengan agenda diskusi Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Indonesia.

Maret

Selama bulan Maret 2025, KSAP menyelenggarakan satu kali Rapat Pleno Komite Konsultatif dengan agenda pembahasan Tata Kelola Kelembagaan dan Keanggotaan KSAP, Pelaporan Kegiatan dan Capaian Tahun 2024 serta Rencana Kerja Tahun 2025. KSAP juga melaksanakan dua kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama dan draf Revisi Kerangka Konseptual.

April

Pada bulan April 2025, KSAP menyelenggarakan tiga kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan Draf Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama, serta PSAP Pengungkapan Pihak Berelasi.

Selain itu, KSAP juga melaksanakan satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pemangku kepentingan eksternal yang membahas Draf PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintahan Umum, serta menyelenggarakan Sosialisasi PSAP 19 Pengaturan Bersama secara daring bekerja sama dengan Direktorat APK, yang diikuti oleh peserta dari Kanwil DJPb, KPPN, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Mei

KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak empat kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas, Kajian Beban Transfer dan Draf PSAP Biaya Pinjaman, draf Revisi PSAP 05 Persediaan serta draf PSAP Pendapatan. Selain itu, KSAP juga mengadakan tiga kali FGD dengan *stakeholder* eksternal dengan agenda pembahasan Mekanisme Penyusunan

Standar/Program Perangkat Lunak Pemeriksaan untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, *Future of Finance and Accounting Profession in Turbulence Era* dan draf PSAP Agrikultur.

Juni

KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan PSAP Pengaruh Perubahan pada Mata Uang Asing, draf Revisi PSAP 07 Aset Tetap, draf Revisi Kerangka Konseptual dan draf PSAP Pengungkapan Sektor Pemerintahan Umum.

Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Tim Kecil dengan agenda pembahasan draf PSAP 07 Aset Tetap dan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas.

Juli

Pada bulan Juli 2025, KSAP menyelenggarakan empat kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan PSAP Imbalan Sosial, Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Kas Berbasis Kas, serta PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas. Selain rapat pleno, KSAP juga melaksanakan satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) SAP yang difokuskan pada pembahasan draf Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.

Pada bulan yang sama, KSAP menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan peserta Anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja KSAP yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema *Sustainability Reporting* (SR 1 dan SR 2).

Pelatihan ini membahas konsep dasar keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal dengan prinsip *people, planet, and profit*.

Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari beberapa pemerintah daerah, yaitu BPKAD Kabupaten Barito Kuala, dengan agenda konsultasi PSAP 17 Properti Investasi; BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan agenda konsultasi terkait aset dan pelaporan keuangan daerah; serta BPKAD Kota Bekasi dengan agenda konsultasi BAS SIPD RI serta permohonan narasumber.

Agustus

Selama bulan Agustus 2025, KSAP menyelenggarakan satu kali Rapat Pleno Komite Konsultatif Triwulan III Tahun 2025 dengan agenda pembahasan revisi Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017, progres penetapan PSAP Imbalan Kerja dan PSAP Agrikultur, rencana *Training of Trainers (ToT)* implementasi PSAP, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan kelembagaan dan pengembangan standar. Selain itu, KSAP juga melaksanakan dua kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan PSAP Beban Transfer serta PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama. Pada bulan yang sama, KSAP menyelenggarakan satu kali *Public Hearing* terkait Revisi Kerangka Konseptual, serta dua kali kegiatan *Training of Trainers* PSAP 18 dan PSAP 19 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang.

Di samping kegiatan tersebut, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

September

KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak empat kali dengan agenda pembahasan Revisi PSAP 05 Persediaan, Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, Draf PSAP Akuntansi pada Era Inflasi Luar Biasa dan Draf PSAP Pendapatan. Selain itu, KSAP juga mengadakan dua kali Training of Trainers PSAP 18 dan PSAP 19 di Mataram dan Banjarmasin.

Selama bulan September 2025, KSAP telah mengirimkan narasumber untuk berbagai kegiatan antara lain Simposium Nasional Akuntansi di Universitas Tadulako, Sosialisasi SAP bekerja sama dengan Direktorat APK dan Kanwil DJPb D.I Yogyakarta, Bimbingan Teknis SAP dengan bahasan khusus pelaporan keuangan BLUD Kabupaten Magetan serta *Focus Group Discussion* (FGD) PSAP 18 yang di selenggarakan oleh Direktorat APK.

Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari BKAD Kabupaten Gorontalo dengan agenda konsultasi PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, PSAP 17 Properti Investasi dan PSAP 18 Pendapatan Dari Transaksi NonPertukaran.

Oktober

Pada bulan Oktober 2025, KSAP menyelenggarakan lima kali Rapat Pleno Mingguan dengan berbagai agenda strategis, meliputi pembahasan Draf PSAP Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing, Revisi PSAP 07 Aset Tetap, pencabutan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah tidak relevan, Revisi Kerangka Konseptual, serta Draf PSAP Rencana Manfaat Pensiun.

Selain kegiatan internal, KSAP juga berperan aktif dengan mengirimkan narasumber pada berbagai kegiatan eksternal, antara lain tiga kegiatan Sosialisasi SAP bekerja sama dengan Direktorat APK yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan, serta diskusi pembahasan identifikasi dan pencatatan hasil kajian yang memenuhi kriteria sebagai aset tak berwujud.

Pada bulan yang sama, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan agenda pembahasan evaluasi perubahan kebijakan akuntansi, serta dari Badan Layanan Umum Gelora Bung Karno dengan agenda konsultasi mengenai mekanisme pengakuan pendapatan JICC dan KSM Artotel.

November

Pada bulan November 2025, KSAP menyelenggarakan satu kali Rapat Pleno Komite Konsultatif dengan agenda utama pembahasan Laporan Kegiatan KSAP dan Pelaporan Keberlanjutan Sektor Publik (*Sustainability Reporting*). Dalam rapat tersebut dipaparkan Analisis SWOT Pelaporan Keberlanjutan Sektor Publik dan kaitannya dengan KSAP dimana BPK mendorong KSAP untuk dapat menyusun standar mengenai Pelaporan Keberlanjutan Sektor Publik. Dalam rapat, disepakati dua usulan strategis utama. Pertama, pembentukan tim kecil khusus yang bertugas menyiapkan standar pelaporan keberlanjutan, termasuk memetakan praktik internasional serta mengkaji integrasi laporan keberlanjutan ke dalam LKPP dan LKPD.

Kedua, pengembangan laporan keberlanjutan sebagai laporan suplemen yang berfungsi melengkapi laporan keuangan dengan informasi tambahan mengenai tata kelola, strategi, dan metrik keberlanjutan, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelaporan yang lebih komprehensif.

Selain itu, KSAP juga melaksanakan tiga kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan Draf PSAP Aset Nonlancar yang Diperuntukkan untuk Dijual dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, Revisi PSAP 03 Laporan Arus Kas, serta Draf PSAP Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral.

Pada bulan yang sama, KSAP turut menyelenggarakan dua kali kegiatan Sosialisasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilaksanakan di Papua dan Palu.

Selain kegiatan tersebut, selama bulan November 2025 KSAP juga berperan aktif dengan mengirimkan narasumber pada berbagai kegiatan eksternal, antara lain Sosialisasi SAP bekerja sama dengan Direktorat APK di Kanwil DJPb Provinsi Lampung; *Focus Group Discussion* pembahasan penetapan nilai wajar aset biologis dan/atau produk agrikultur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Seminar Laporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; asistensi penyusunan laporan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri; diskusi mengenai aset tanah Hak Pengelolaan Lahan di Kementerian Transmigrasi; serta seminar daring “Membangun Citra Akuntan Publik yang Berintegritas melalui Keterampilan Komunikasi dan Etika Profesi” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta.

Pada bulan November 2025, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari beberapa pemerintah daerah antara lain BKD Kabupaten Kepahiang dengan agenda pembahasan

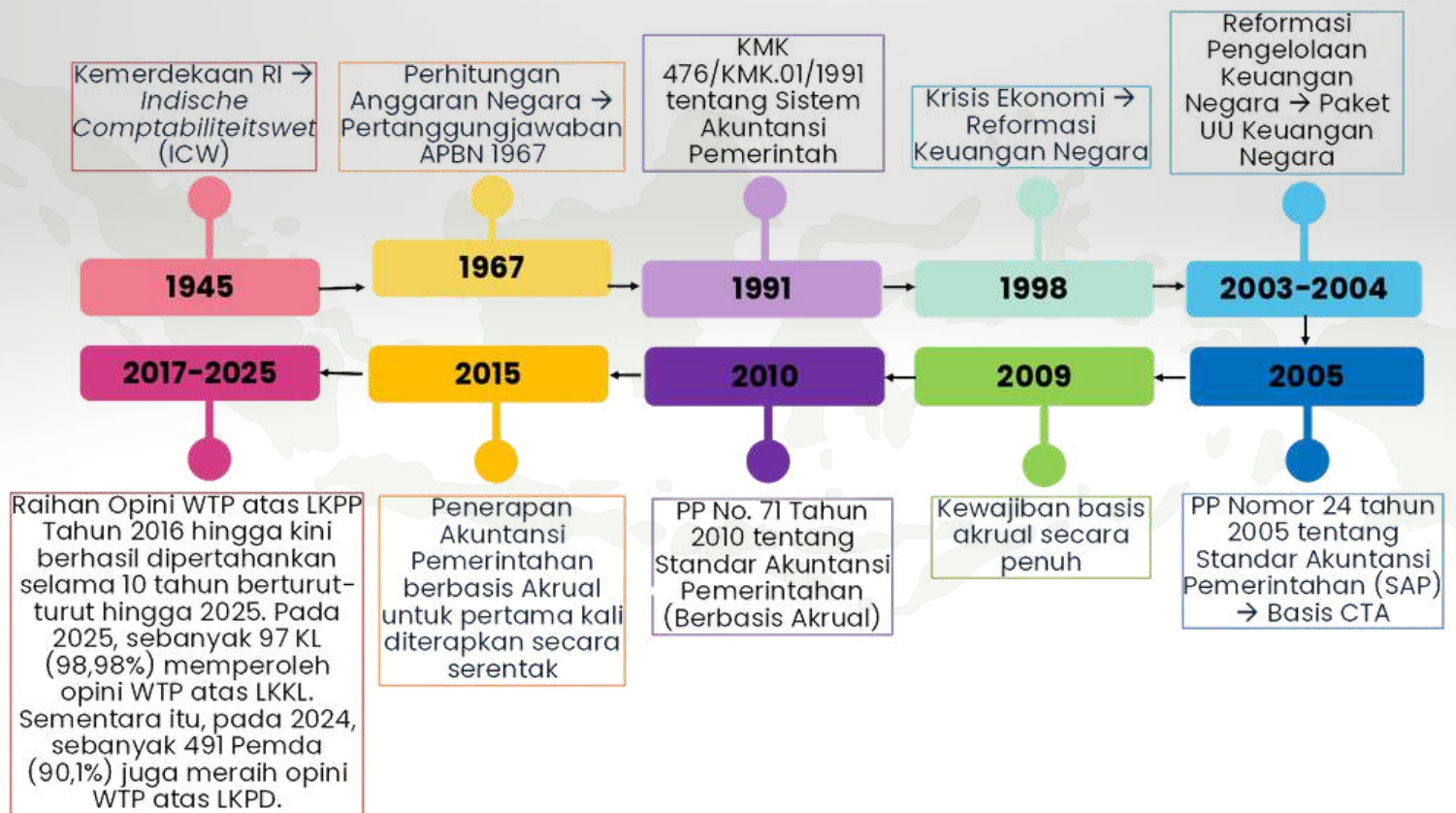
penyertaan modal dalam bentuk barang, penghapusan ATB, penyerahan persediaan, dan properti investasi; Badan Keuangan Kota Gorontalo dan BKPKD Kabupaten Boalemo dengan agenda pembahasan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran; Bapenda Provinsi DKI Jakarta dengan agendakonsultasi Kode Rekening Pemanfaatan Aset BMD dan BKD Kota Pangkal Pinang dengan agenda Konsultasi Penghapusan Piutang PBB Secara permanen Program Pemutihan Pajak.

— Desember —

Pada Bulan Desember 2025, KSAP menyelenggarakan tiga kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan Draf Revisi PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, Draf PSAP Kombinasi Sektor Publik, Draf PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama, serta Draf PSAP Investasi pada Entitas yang Dikendalikan. Selain itu, KSAP juga mengirimkan narasumber pada berbagai kegiatan antara lain FGD Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BUMN dalam LKBUN/LKPP pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat APK; FGD pembahasan Draf Pedoman Akuntansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Sosialisasi Peraturan Walikota mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pada bulan yang sama, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan BPKAD Kota Bekasi dengan agenda konsultasi Kebijakan Akuntansi.

Timeline Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah



02

Profil dan Keanggotaan KSAP

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi tonggak sejarah penting bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Indonesia. Terbitnya Undang-Undang ini membawa pengaruh yang luar biasa di setiap sisi pengelolaan keuangan mulai dari hulu ke hilir. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menjadi landasan penting bagi organisasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus disusun oleh komite yang independen serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun perjalanan panjang pembentukan KSAP diilustrasikan seperti gambar di bawah.

KSAP dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Pembentukan KSAP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

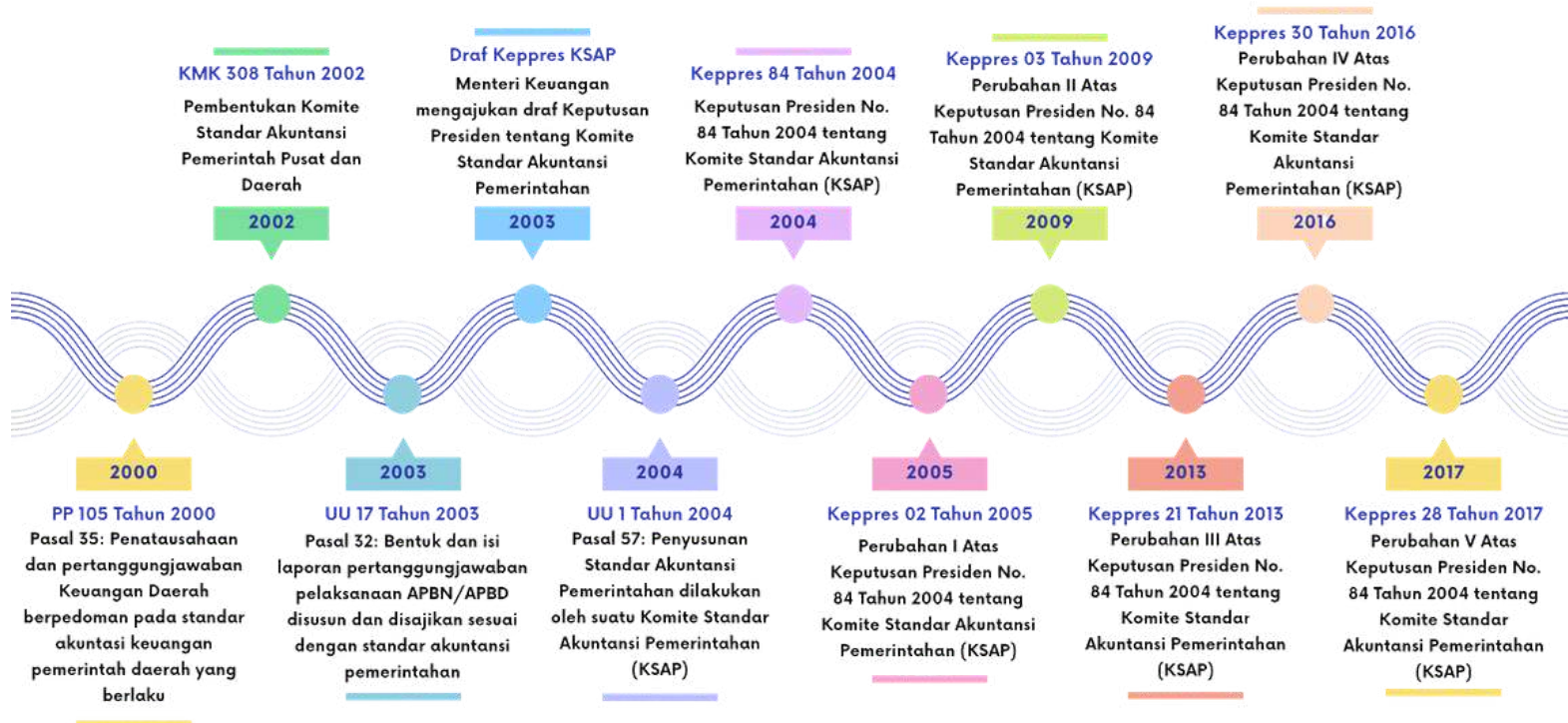
KSAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Sesuai dengan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual-based accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, dalam rangka strategi menuju penerapan *accrual-based accounting*, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13 Juni 2005.

KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Pembentukan KSAP



Dalam rangka pengaturan organisasi, KSAP menetapkan Statuta KSAP sebagai pedoman dasar penyelenggaraan organisasi dan kegiatan KSAP yang ditetapkan dalam Keputusan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 11/K.1/KSAP/X/2015 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar KSAP.

Visi:

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas".

Misi:

- Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
- Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan KSAP

- Menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
- Mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Dasar KSAP

Independen

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.

Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.

Demokratis

Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan pada semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

Komite Konsultatif KSAP

01

Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.

Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif

Direktur Jenderal Perbendaharaan saat ini dijabat oleh Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. Karier beliau di Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun 1987. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2017-2018) dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2018-2022). Sejak 1 November 2022, beliau diamanatkan sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (Manajemen) di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Taxation dari University of Denver pada tahun 1997.

02

Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si.

Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah saat ini dijabat oleh Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Dalam perjalanan kariernya di Kementerian Dalam Negeri, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2019-2020) dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (2020-2022). Selain itu, beliau juga pernah dipercaya sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara (2024-2025) dan Pj. Gubernur Papua (2025).

Beliau memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2003 dan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari universitas yang sama pada tahun 2009. Pendidikan kedinasan diselesaikan di Institut Ilmu Pemerintahan pada tahun 1999 dan STPDN pada tahun 1994.

03

Dr. Ardan Adiperdana

Anggota Komite Konsultatif

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 2022-2026 dijabat oleh Dr. Ardan Adiperdana. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai President ASEAN Federation of Accountants (AFA) periode 2026-2027. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada periode Maret 2015 hingga Juni 2019. Beliau juga pernah mengemban tugas sebagai Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Akuntabilitas pada periode 2020-2021 serta Staf Khusus I Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada periode 2021-2024.

Dalam bidang pendidikan, beliau meraih gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1987, Master of Business Administration dari Saint Mary's University, Kanada, pada tahun 1992, serta gelar Doktor dalam bidang Manajemen Strategis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2013.

Komite Konsultatif KSAP

04

Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.

Anggota Komite Konsultatif

Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA. merupakan Anggota Komite Konsultatif dari kalangan profesional, beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan pada BPKP, serta Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian. Beliau merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kemudian melanjutkan pendidikan magister di Case Western Reserve University dan doktoral di Cleveland State University, Amerika Serikat.

Selain itu, beliau aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain sebagai anggota Forum Corporate Governance Indonesia, Anggota Dewan Pertimbangan Profesi IAI Kementerian Akuntan Manajemen, serta anggota Institute of Management Accountants dan Institute of Internal Auditors.

05

Prof. Dr. Mardiasmo, SE., AK., MBA.

Anggota Komite Konsultatif

Prof. Dr. Mardiasmo, S.E., Ak., MBA. merupakan Anggota Komite Konsultatif dari kalangan profesional. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam jabatan strategis di pemerintahan, antara lain sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia sekaligus anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ex-officio dari Kementerian Keuangan pada periode 2014-2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2010-2014) serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2006-2010). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan (2019-2022). Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan Ketua Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam bidang pendidikan, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1981), Master of Business Administration dari University of Bridgeport, Amerika Serikat (1989), serta gelar Doktor dari School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris (1999). Saat ini, beliau merupakan Guru Besar di bidang Governansi Sektor Publik pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.



Tugas Komite Konsultatif

- Memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Memberikan masukan kepada Komite Kerja terkait kegiatan yang menjadi prioritas;
- Memberikan alternatif solusi terhadap *pending matters* KSAP yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Kerja;
- Mengadakan pertemuan secara rutin dengan Komite Kerja, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Menjembatani pertemuan antara Komite Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- Memberikan pandangan terhadap pemilihan anggota Komite Kerja; dan
- Tugas lainnya guna mendukung visi dan misi KSAP.

Sumber:

Keputusan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11/K.1/KSAPIX/2015 tentang Statuta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite Kerja KSAP

01

Sumiyati, Ak., MFM.

Ketua merangkap Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, beliau pernah menjabat pada beberapa posisi di Kementerian Keuangan diantaranya sebagai Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Beliau merupakan akuntan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1989 dan meraih gelar *Master of Financial Management* dari Central Queensland University pada tahun 1994.

Selain itu, beliau aktif dalam berbagai peran profesional, antara lain sebagai Anggota Komite Audit Indonesia Investment Authority (INA) sejak Juli 2021, Anggota Komite Audit Kementerian Kesehatan sejak Agustus 2022, serta Anggota Komite Audit Kementerian Keuangan periode 2022-2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2017-2021) dan Anggota Komite Pengawas Pajak (2017-2021).

02

Dr. Dwi Martani, CA, CPA

Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Kerja

Beliau merupakan staf pengajar pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1993. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Saka Energi Indonesia sejak 26 Desember 2021.

Selain itu, beliau aktif dalam berbagai peran profesional, antara lain sebagai Anggota Dewan Pengarah Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia sejak tahun 2013, Anggota Komite Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Haji sejak tahun 2019, serta Anggota Tim Teknis Narasumber Kebijakan Akuntansi Keuangan Gabungan BUMN sejak tahun 2022. Beliau meraih gelar Doktor (S3) di bidang Ilmu Manajemen, Program Studi Keuangan, dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

03

Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.

Sekretaris merangkap Anggota Komite Kerja

Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji sejak tahun 2022. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan serta Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada periode 2012–2015, beliau juga mengemban tugas sebagai Inspektur VI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beliau merupakan akuntan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1991 dan memperoleh gelar *Master of Science in Information Management* dari School of Engineering and Applied Science, The George Washington University, Washington, D.C., Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Komite Kerja KSAP

04

Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.

Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, saat ini beliau menjabat sebagai Pimpinan PT Multi Prima Widya Consultant. Karier profesional beliau diawali sebagai asisten auditor pada Kantor Akuntan Hanadi Rahardja. Selain itu, beliau juga aktif sebagai staf pengajar di beberapa perguruan tinggi, antara lain Program Magister Manajemen Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, dan Program Magister Terapan Universitas Indonesia. Sejak tahun 1990, beliau juga menjadi Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (Akuntansi) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1973, kemudian melanjutkan studi magister di Program Magister Manajemen Universitas Indonesia serta meraih gelar doktor di bidang Ilmu Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

05

Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM

Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, beliau bertugas sebagai Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2019-2024). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat serta Direktur Keuangan BLU CPO Fund. Dalam perjalanan kariernya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Beliau merupakan alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

06

Dr. Hamdani, Ak., MM, M.Si

Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, saat ini beliau menjabat sebagai Lektor Kepala FEB Universitas Andalas. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan dan Ekonomi serta Direktur Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Beliau merupakan alumnus Universitas Andalas tahun 1987 dan melanjutkan pendidikan magister di universitas yang sama, serta memperoleh gelar magister lainnya dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, beliau meraih gelar Doktor Akuntansi dari Universitas Trisakti.

Komite Kerja KSAP

07

Amdi Very Dharma, Ak., MAcc., CA, QIA, CGCAE

Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, saat ini beliau bertugas sebagai Dosen Aktif di UPN Veteran Jakarta. Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, serta sebelumnya mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola, Direktur Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, dan Direktur Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya.

Beliau menyelesaikan pendidikan magister dan memperoleh gelar *Master of Accountancy* dari University of Dundee, Inggris, pada tahun 1993.

08

Chalimah Pujiastuti, SE, Ak., MAFIS

Anggota Komite Kerja

Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman pada Direktorat Jenderal Anggaran, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1995, serta gelar *Master of Science in Accounting* dari Cleveland State University, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

09

Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., CGAE

Anggota Komite Kerja

Sebagai anggota dari kalangan profesional, saat ini beliau menjabat sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I pada BPKP, serta Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Dalam perjalanan kariernya, beliau juga mengemban berbagai jabatan strategis lainnya, antara lain sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan pada BPKP serta Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.

Beliau merupakan lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1981 dan memperoleh gelar Magister Manajemen Pemasaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (IPWI Jakarta).



Tugas Komite Kerja

- Menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Menyusun Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Menyusun Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan KSAP;
- Memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan turunannya;
- Menetapkan keanggotaan unit pendukung KSAP yang terdiri dari Kelompok Kerja dan Mengusulkan keanggotaan Sekretariat KSAP;
- Berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Komite Konsultatif dalam mendukung tercapainya tujuan KSAP;
- Mengkoordinasikan kelompok kerja dan sekretariat dalam mencapai tujuan KSAP secara efektif dan efisien;
- Melaporkan kegiatan KSAP kepada Menteri Keuangan;
- Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan/atau Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya sekali dalam periode keanggotaan; dan
- Menetapkan statuta dan mengusulkan perubahannya.

Sumber:

Keputusan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11/K.1/KSAP/XI/2015 tentang Statuta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Kelompok Kerja KSAP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja. Tata kerja dan keanggotaan Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja KSAP.

Kelompok Kerja untuk periode tahun 2025 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Kerja KSAP Nomor KEP-05/K.1/KSAP/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor KEP-13/K.1/KSAP/VIII/2025.

Kelompok Kerja tersebut beranggotakan 31 (tiga puluh satu) orang yang berasal dari berbagai lembaga. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Ketua Kelompok Kerja

Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA

Wakil Ketua Kelompok Kerja

R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws

Anggota:

Muliani Sulya Fajarianti, SE,
MEc.Dev, Cert. IPSAS, CGAE.

Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA.,
Cert. IPSAS.

Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA.,
Cert. IPSAS.

Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP.

Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS.

Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak.

Prof. Dr. Ratna Wardhani,
SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS.

Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP.,
Cert. IPSAS.

Didied Ary Setyanang, SST. Ak.,
M.Prof. Acc.

Januarti Tiurmaida, SE., MM.

I Putu Sukma Hendrawan., SE., MSM.,
PFM., CPMA.

Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM.,
CAPM, CPMA.

Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar,
SE., Ak., CA.

Dr. Budi Mulyana, SE., M.Si., Cert. IPSAS.,
CGAE., CPFM.

Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA.

Yan Rahadian S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS.

Agung Ariyanto S.E., Ak.

Dodok Dwi Handoko S.ST Ak., M.Sc.

Muh. Tunjung Nugroho SE., Ak., ME., CA.

Achmad Fauzi SE., M.Ak. Cert. IPSAS.

Kelompok Kerja KSAP

Judika Mariana Hutabarat, SE., MA.

Esti Dwi Arvina, S.I.P., M.B.A. Cert. IPSAS.

Ingelia Puspita, S.E., Ak., M.Com.

Wakhid Susilo, S.S.T., M.Acc.

Hazmi Muzakki, SE.

Sunaryo, S.S.T., Ak., MSE

Dr. Puji Wibowo, Ak., MIDEK, C.A., CGAE,
CACP, Cert. IPSAS

Dr. Agung Dinarjito, S.S.T Ak, M., AccFin

Dr. Taufik Hidayat, S.E., Ak., M.M.

Nanda Ayu Wijayanti, S.E.,Ak., M.B.A., Ph.D

Nurul Anwar, SE, MSc.

Tugas Kelompok Kerja

- Membantu Komite Kerja dalam perumusan dan pengembangan SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis; dan
- Membantu Komite Kerja dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan turunannya.

Sumber:

Keputusan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11/K.1/KSAP/XI/2015 tentang Statuta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



Sekretariat KSAP

Sesuai dengan Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 28 Tahun 2017 bahwa untuk melaksanakan tugasnya, KSAP dibantu oleh Sekretariat KSAP yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.01/2022, tugas Kesekretariatan KSAP dilaksanakan oleh Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dimana salah satu tugasnya adalah pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun susunan anggota Sekretariat KSAP Tahun 2025 sebagai berikut:

Esti Dwi Arvina,
Kepala Subdirektorat SAP

Achmad Fauzi,
Kepala Seksi Fasilitas KSAP

Satria Mahardika,
Anggota

Eka Rizkia Nabila,
Anggota

03

Produk KSAP dan Proses Penyusunan SAP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa untuk menjamin independensinya, KSAP dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan bekerja berdasarkan proses baku penyusunan standar (*due process*). Selanjutnya dalam lampiran undang-undang dimaksud dijelaskan bahwa usulan standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pertimbangan BPK tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum draf standar tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004, KSAP telah menyelesaikan penyusunan 2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas menuju AkruaI dan SAP Basis AkruaI), 24 Buletin Teknis (Bultek), 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan, serta Panduan SAP di Masa Pandemi *Covid-19*. Secara rinci produk KSAP terdiri dari:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Kas Menuju AkruaI yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP);
- b. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis AkruaI yang ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 12 PSAP;
- c. Revisi dan Penambahan PSAP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PP 71 Tahun 2010 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terdiri dari 8 PSAP Baru dan 2 PSAP Revisi.

2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP)

Bultek SAP merupakan penjelasan teknis akuntansi terkait penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sampai dengan tahun 2024, KSAP telah menerbitkan Bultek SAP yang terdiri dari:

- a. Bultek SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebanyak 14 Bultek;
- b. Bultek SAP Berbasis AkruaI sebanyak 10 Bultek.

3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sampai dengan tahun 2025, KSAP telah menerbitkan 4 (empat) IPSAP SAP.

4. Bunga Rampai Studi Kasus Standar Akuntansi Pemerintahan

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan merupakan kumpulan pertanyaan/kasus yang disampaikan oleh kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah beserta tanggapan yang dibuat oleh KSAP. Sampai dengan saat ini, KSAP telah menyusun 14 Edisi Bunga Rampai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2025.

5. Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Masa Pandemi *Covid-19*

Panduan ini diterbitkan oleh KSAP untuk digunakan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang relevan terkait dengan program serta kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19*. Panduan ini bukan merupakan pernyataan standar dan tidak dimaksudkan untuk memberikan interpretasi PSAP.

Due Process Penyusunan Standar

PROSES BAKU PENYUSUNAN (*Due Process*) SAP BERBASIS AKRUAL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, proses penyiapan SAP Berbasis Akrual dilakukan melalui prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan (*due process*) yang dilakukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP. *Due process* meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

g. Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

Due Process Penyusunan Standar

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

j Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

Materi dan Rujukan yang Digunakan dalam Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual oleh KSAP



PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



Produk IFAC (*The International Federation of Accountant*)



Produk IASB/IASB (*The International Accounting Standards Committee/ International Accounting Standard Board*)



Produk IMF (*International Monetary Fund*)



Ikatan Akuntan Indonesia

Produk IAI (*Ikatan Akuntan Indonesia*)



Produk GASB-USA (*Governmental Accounting Standard Board-USA*)



Produk FASB-USA (*Financial Accounting Standard Board-USA*)



Produk FASAB-USA (*The Federal Accounting Standards Advisory Board*)

Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual

PSAP-IPSAS Convergence

1. SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar.
2. IPSAS menjadi rujukan Standar Akuntansi Pemerintahan di dunia atau Sektor Publik.
3. BPK memberikan masukan agar penyusunan dan pengembangan PSAP merujuk pada IPSAS, bahkan jika ada perbedaan dengan IPSAS harus diberikan penjelasan.
4. Mulai PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi (IPSAS 32), sistematika penyusunan SAP telah selaras dengan IPSAS (*Standard, Application Guidance, Basis for Conclusions, Implementation Guidance, Illustrative Examples*).
5. IPSAS - *International Public Sector Accounting Standard* dikembangkan dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dengan pendekatan:
 - Standar khusus IPSAS jika tidak ada IFRS yang mengatur;
 - Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor publik dan *privat*;
 - Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor publik.

Dalam rangka mendukung harmonisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dengan praktik terbaik internasional, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) secara berkelanjutan menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dengan mengacu pada standar sektor publik internasional, yaitu *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Upaya harmonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat diperbandingkan secara andal dengan laporan keuangan pemerintah negara lain.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, KSAP menerapkan pendekatan adaptasi terhadap IPSAS dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hingga saat ini, tingkat adopsi IPSAS dalam SAP baru mencapai sekitar 25 persen dari keseluruhan standar IPSAS yang tersedia, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk pengembangan lebih lanjut.

Penguatan arah kebijakan untuk mengacu pada IPSAS juga mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui Surat Nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, BPK menyampaikan rekomendasi agar penyusunan standar akuntansi pemerintahan ke depan dilakukan dengan merujuk pada IPSAS, termasuk di dalamnya penyusunan 13 standar baru yang selaras dengan praktik internasional.

PROGRES PERKEMBANGAN PSAP MASUKAN BPK

No.	IPSAS Sesuai Masukan BPK	Progres Saat Ini	Keterangan
1.	<i>Events After The Reporting Date</i>	Telah diterbitkan PMK	PMK Nomor 157/PMK.05/2020 PSAP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
2.	<i>Investment Property</i>	Telah diterbitkan PMK	PMK Nomor 85/PMK.05/2021 PSAP 17 Properti Investasi
3.	<i>Revenue From Non-Exchange Transactions (Taxes And Transfers)</i>	Telah diterbitkan PMK	PMK 122 Tahun 2024 PSAP 18 Pendapatan Dari Transaksi NonPertukaran
4.	<i>Agriculture</i>	Telah diterbitkan PMK	PMK 85 Tahun 2025 PSAP 20 Agrikultur
5.	<i>Employee Benefits (Pension Fund)</i>	Proses RPMK (Menunggu Arahan Menteri Keuangan)	-
6.	<i>Provisions, Contingent Liability And Contingent Assets</i>	Proses Izin Prinsip RPMK	-
7.	<i>Financial Instruments: Disclosure, Presentations, Recognition And Measurement</i>	Finalisasi Pasca Pertimbangan BPK	-
8.	<i>Leases</i>	Draf Final Siap dimintakan Pertimbangan BPK	-
9.	<i>Revenue From Exchange Transactions</i>	Proses Drafting	-
10.	<i>Related Party Disclosures</i>	Proses Drafting	-
11.	<i>Impairment Of Non-Cash Generating Assets</i>	Proses Drafting	-
12.	<i>Impairment Of Cash Generating Assets</i>	Proses Drafting	-
13.	<i>Disclosure Of Financial Information About General Government Sector</i>	Proses Drafting	-

Ingin berkonsultasi dengan KSAP terkait PSAP?

Sobat KSAP dapat mengirimkan surat resmi melalui:



Pengiriman Dokumen Fisik

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gedung Prijadi Praptosuharjo III, Lantai 3

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat

Email Resmi KSAP

sekretariat.ksap@gmail.com

04

Capaian Kinerja KSAP Tahun 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025

1

Progres Penyusunan Draf PSAP Tahun 2025

Telah diterbitkan PMK

PMK 85 TAHUN 2025

Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 20
Agrikultur

**PSAP tersebut ditetapkan tanggal 27
November 2025*

Draf Final PSAP Siap RPMK

1. PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
2. PSAP Imbalan Kerja
3. PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian
4. PSAP Instrumen Keuangan
5. PSAP Instrumen Keuangan-Pengungkapan

Melanjutkan Proses Drafting dari Tahun 2024

1. PSAP Sewa
2. PSAP Pendapatan
3. PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
4. PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas
5. PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum
6. PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas
7. PSAP Imbalan Sosial
8. PSAP Pengukuran
9. PSAP Pengaruh Perubahan pada Mata Uang Asing
10. PSAP Biaya Pinjaman
11. PSAP Pelaporan Keuangan Saat Hiperinflasi Ekonomi
12. PSAP Kombinasi Sektor Publik

Penyusunan Draf PSAP Baru

1. PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama
2. PSAP Investasi pada Entitas Dikendalikan
3. PSAP Aset Non Lancar Yang Diperuntukkan untuk dijual dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
4. PSAP Pengukuran
5. PSAP Beban Transfer
6. PSAP Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
7. PSAP Kombinasi Sektor Publik

Melanjutkan Penyusunan Draf Revisi PSAP dari Tahun 2024

1. Revisi Kerangka Konseptual
2. Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
3. Revisi PSAP 02 LRA Berbasis Kas
4. Revisi PSAP 03 Laporan Arus Kas
5. Revisi PSAP 05 Persediaan
6. Revisi PSAP 07 Aset Tetap
7. Revisi PSAP 13 Penyajian LK BLU

Penyusunan Draf Revisi PSAP

Revisi PSAP 04
Catatan atas Laporan Keuangan

Capaian Kinerja Tahun 2025

2

Penyusunan Bunga Rampai Tahun 2025

Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025 yang berisi kompilasi surat-surat jawaban KSAP atas konsultasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025 dapat diunduh melalui:

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025

Surat konsultasi pemangku kepentingan ke KSAP sebagaimana telah dibukukan dalam Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	13 Februari 2025	S-11/K.1/KSAP/II/2025	Pj. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Tanggapan Konsultasi atas SAP (PSAP 02 LRA, PSAP 08 KDP, Bultek Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Bultek Nomor 23 Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan)
2	28 April 2025	S-22/K.1/KSAP/IV/2025	Plh. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap
3	4 Agustus 2025	S-50/K.1/KSAP/VIII/2025	Sekretaris	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Tanggapan Mengenai Permintaan Petunjuk Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan pada APBD terhadap Dukungan Pengembalian Pinjaman KKMP yang Bersumber dari DAU/DBH.
4	4 September 2025	S-74/K.1/KSAP/IX/2025	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Implementasi Kebijakan HGBT

Capaian Kinerja Tahun 2025

Bunga Rampai Tahun 2025

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
5	11 September 2025	S-79/KK.1/KS AP/IX/2025	Bupati	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Perlakuan Akuntansi terhadap Hasil Penilaian Tanah dan/atau Gedung dengan Menggunakan Nilai Wajar
6	24 September 2026	S-85/K.1/KSA P/IX/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang
7	24 September 2026	S-86/K.1/KSA P/IX/2025	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Nias	Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan atas Mekanisme Pencatatan atas Rekomendasi Terhadap Hibah Aset Daerah kepada Yaperti Nias
8	24 September 2026	S-87/K.1/KSA P/IX/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Implementasi Kebijakan HGBT
9	6 Oktober 2025	S-92/K.1/KSA P/IX/2025	Direktur	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Penjelasan Kebijakan Akuntansi Terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
10	28 Oktober 2025	S-99/K.1/KSA P/X/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Terkait Pencatatan Aset Tanah

Capaian Kinerja Tahun 2025

Bunga Rampai Tahun 2025

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
11	28 Oktober 2025	S-100/K.1/KS AP/X/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Penjelasan Terkait Perlakuan Akuntansi Pembayaran Tagihan
12	20 November 2025	S-115/K.1/KS AP/XI/2025	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP
13	15 Desember 2025	S-124/K.1/KS AP/XII/2025	Direktur	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
14	31 Desember 2025	S-125/K.1/KS AP/XII/2025	Kepala Biro Umum	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Masukan dan Pertimbangan Terkait Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang Dapat Memenuhi Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)

Capaian Kinerja Tahun 2025

3

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

Pada tahun 2025, anggota KSAP menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di antaranya sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
1.	6 Februari 2025	Kegiatan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Aset pada Inspektorat	- Rahadian Widagdo - Achmad Fauzi	Pemerintah Kabupaten Kediri
2.	19 Februari 2025	Bimtek Aplikasi SIPD bagi SKPKD pada Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Tahun 2025	Rahadian Widagdo	Pemerintah Kota Bekasi
3.	7 Maret 2025	FGD Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i>	Joni Afandi	Badan Pengawas Obat dan Makanan
4.	20 Februari 2025	Rapat Penyesuaian PP terkait Rencana Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah yang bersumber dari DAK Non Fisik melalui RKUN ke Rekening masing masing Guru ASN Daerah	- Joni Afandi - Agus Kristianto	Kementerian Dalam Negeri
5.	08 Mei 2025	Audiensi Pembahasan Kebijakan Akuntansi Syariah Modalitas Pembiayaan Syariah	Dwi Martani	Islamic Development Bank (IsDB) dan PT SMI
6.	14 Mei 2025	<i>Seminar Future-Proofing Economies: The Strategic Role of Accountants in Turbulent Times</i>	Mei Ling	Ikatan Akuntansi Indonesia

Capaian Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
7.	15 Mei 2025	FGD Mekanisme Penyusunan Standar/Perangkat Lunak Pemeriksaan untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	Dwi Martani	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
8.	15 Mei 2025	FGD bersama Presiden <i>International Federation of Accountants</i> (IFAC)	Dwi Martani	Ikatan Akuntansi Indonesia
9.	10 Juni 2025	ST Lokakarya Penilaian Opsi Reformasi <i>Public Financial Management</i> (PFM) di Tingkat Puskesmas dalam Implementasi ILP	- Sumiyati - Isa Ashari K.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
10.	16 Juni 2025	Kegiatan INCoTalk ke-5	- Sumiyati - Didied Ary S.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
11.	17 Juni 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Semester I Tahun 2025 pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	- Joni Afandi - Achmad Fauzi	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
12.	21 Juli 2025	Diskusi mengenai Struktur Pendanaan Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah Daerah sebagai Penjamin	- Achmad Fauzi - Kresia Ramadanty	Kementerian Dalam Negeri
13.	31 Juli 2025	<i>Training of Trainers</i> PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama	- Joni Afandi - I Putu Sukma Hendrawan	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Capaian Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
14.	31 Juli 2025	Pembinaan <i>Online</i> Pemda Agustus 2025	Didied Ary S.	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
15.	4 Agustus 2025	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Agung Ariyanto	Pemerintah Kota Bekasi
16.	15 Agustus 2025	<i>Public Hearing</i> Revisi Kerangka Konseptual	Yan Rahadian	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
17.	19 Agustus 2025	<i>Training of Trainers</i> PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama	• Dwi Martani • Joni Afandi	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kanwil DJPb Sumatera Selatan
18.	21 Agustus 2025	FGD Implikasi Skema Pensiun <i>Notional Defined Contribution</i> terhadap Liabilitas Jangka Panjang Pemerintah dalam Laporan Keuangan	Yan Rahadian	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
19	29 Agustus 2025	<i>Training of Trainers</i> PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama	• Sumiyati • Budi Mulyana	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat
20	9 September 2025	Simposium Nasional Akuntansi	Dwi Martani	Universitas Tadulako

Capaian Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
21	10 September 2025	FGD Laporan Keuangan Entitas Sui Generis	- Dwi Martani - Didied Ary S.	Ikatan Akuntansi Indonesia
22	16 September 2025	FGD PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran	Dwi Martani	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
23	19 September 2025	Training of Trainers PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama	- Didied Ary S. - Rahadian Widagdo	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kanwil DJPb Kalimantan Selatan
24.	22 September 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan	- Esti Dwi Arvina - Hazmi Muzakki	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta
25.	22 September 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan	- Januarti Tiurmaida - Achmad Fauzi	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Kanwil DJPb Jawa Timur
26.	29 September 2025	Kegiatan <i>Treasury Financial Advisor</i>	Joni Afandi	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
27.	06 Oktober 2025	Pembahasan Perlakuan Aset Bersejarah	Sumiyati	Kementerian Kebudayaan

Capaian Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
28.	8 Oktober 2026	Kegiatan Pembinaan Pemda Lingkup Provinsi Jawa Tengah	Agung Dinardjito	Kanwil DJPb Jawa Tengah
29.	10 Oktober 2026	Pembahasan Identifikasi Pencatatan Hasil Kajian Yang Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tak Berwujud	• Didied Ary S. • Rahadian Widagdo	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
30.	30 Oktober 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan	• Januarti Tiurmaida • Hazmi Muzakki	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Kanwil DJPb Jawa Timur
31.	3 November 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan	• Sumiyati • Joni Afandi • Achmad Fauzi	Komite Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kanwil DJPb Papua
32.	3 November 2025	FGD Pembahasan Penetapan Nilai Wajar Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	Rahadian Widagdo	Pemprov DKI Jakarta
33.	3 November 2025	Seminar Laporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah	• Dwi Martani • Achmad Fauzi	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
34.	5 November 2025	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	• Didied Ary Setyanang • Joni Afandi	Kementerian Dalam Negeri

Capaian Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
35.	7 November 2025	Perlakuan Standar Akuntansi atas Tanah HPL	I Putu Sukma Hendrawan	Kementerian Transmigrasi
36.	18 November 2025	Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan	- Achmad Fauzi - Hazmi Muzakki	Komite Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah
37.	20 November 2025	Kegiatan Seminar Online Membangun Citra Akuntan Publik yang Berintegritas melalui Keterampilan Komunikasi dan Etika Profesi	Joni Afandi	Universitas Negeri Jakarta
38.	04 Desember 2025	FGD Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BUMN dalam LKBUN/LKPP Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025	- Dwi Martani - Didied Ary Setyanang	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
39.	04 Desember 2025	FGD Pembahasan Draf Pedoman Akuntansi	Jamason Sinaga	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
40.	10 Desember 2025	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemda, Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemda dan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan Keuangan Pemda	Rahadian Widagdo	Pemerintah Kota Bekasi

Capaian Kinerja Tahun 2025

4

Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan *Stakeholder*

Pada tahun 2025, KSAP menerima kunjungan dari *stakeholder* dalam rangka konsultasi atas permasalahan seputar Standar Akuntansi Pemerintahan. Daftar *stakeholder* yang berkunjung ke KSAP selama tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal	Instansi	Keperluan
1.	7 Januari 2025	DPRD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	Konsultasi terkait Kebijakan Akuntansi Pemda
2.	15 Januari 2025	BKPAD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Konsultasi terkait Pagu Anggaran, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Penghapusan Pasar yang Terbakar
3.	9 Juli 2025	RSUD Raden Mataher, Jambi	Konsultasi terkait Laporan Keuangan BLUD
4.	23 Juli 2025	BPKAD Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan	Konsultasi terkait PSAP 17 Properti Investasi
5.	31 Juli 2025	BKAD Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	Konsultasi terkait Aset dan Pelaporan Keuangan Negara
6.	31 Juli 2025	BPKAD Kota Bekasi, Jawa Barat	Konsultasi terkait BAS di SIPD RI
7.	25 Agustus 2025	BKAD Kabupaten Lampung Barat, Lampung	Konsultasi terkait Standar Akuntansi Pemerintah
8.	28 Agustus 2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Konsultasi terkait Standar Akuntansi Pemerintah

Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Stakeholder

No	Tanggal	Instansi	Keperluan
9.	16 September 2025	BKAD Kabupaten Gorontalo, Gorontalo	Konsultasi terkait PSAP 16 Konsesi Jasa, PSAP 17 Properti Investasi dan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran
10.	9 Oktober 2025	BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan	Pembahasan mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi
11.	9 Oktober 2025	BLU Gelora Bung Karno	Konsultasi mengenai Mekanisme Pengakuan Pendapatan JICC dan KSM Artotel
12.	12 November 2025	BKD Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Konsultasi mengenai Penyertaan Modal dalam Bentuk Barang, Penghapusan ATB, Penyerahan Persediaan, Properti Investasi
13.	24 November 2025	BPKPD Kabupaten Boalemo, Gorontalo	Konsultasi mengenai PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran
14.	25 November 2025	Bapenda DKI Jakarta	Konsultasi mengenai Kode Rekening Pemanfaatan Aset BMD
15.	26 November 2025	Bakeuda Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Konsultasi mengenai Penghapusan Piutang PBB secara Permanen (Program Pemutihan Pajak)
16.	02 Desember 2025	BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	Konsultasi mengenai Kebijakan Akuntansi
17.	09 Desember 2025	BPKAD Kota Bekasi, Jawa Barat	Konsultasi mengenai Kebijakan Akuntansi, SAPD dan Pelaporan Keuangan

Capaian Kinerja Tahun 2025

5

Perbandingan Target dan Capaian Penyusunan PSAP Tahun 2025

No	PSAP	Target	Capaian
1.	PSAP Agrikultur (IPSAS 27)	Ditetapkan menjadi PMK	Ditetapkan menjadi PMK
2.	PSAP Imbalan Kerja (IPSAS 39)	Ditetapkan menjadi PMK	PSAP dalam Proses Penetapan PMK
3.	PSAP Provisi, Aset Kontingensi dan Kewajiban Kontingensi (IPSAS 19)	Draf Final PSAP Siap RPMK	Draf Final PSAP Siap RPMK
4.	PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian (IPSAS 28)		
5.	PSAP Instrumen Keuangan (IPSAS 41)		
6.	PSAP Instrumen Keuangan-Pengungkapan (IPSAS 30)		
7.	Revisi Kerangka Konseptual	<i>Public Hearings</i>	<i>Public Hearings</i>
8.	Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
9.	Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran & Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
10.	Revisi PSAP 03 Laporan Arus Kas	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia

Capaian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Capaian Penyusunan PSAP Tahun 2025

No	PSAP	Target	Capaian
11.	Revisi PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
12.	Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
13.	Revisi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
14.	PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum	Penyusunan Kajian	<i>Drafting</i>
15.	PSAP Pengaruh Perubahan pada Mata Uang Asing (IPSAS 4)	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
16.	PSAP Biaya Pinjaman (IPSAS 5)	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>
17.	PSAP Pelaporan Keuangan saat Hiperinflasi Ekonomi (IPSAS 10)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
18.	PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (IPSAS 20)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
19.	PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas (IPSAS 21)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
20.	PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum (IPSAS 22)	<i>Drafting</i>	<i>Drafting</i>

Capaian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Capaian Penyusunan PSAP Tahun 2025

No	PSAP	Target	Capaian
21.	PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas (IPSAS 26)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
22.	PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama (IPSAS 36)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
23.	PSAP Investasi pada Entitas yang Dikendalikan (IPSAS 38)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
24.	PSAP Imbalan Sosial (IPSAS 42)	Penyusunan Kajian	<i>Drafting</i>
25.	PSAP Sewa (IPSAS 43)	<i>Drafting</i>	<i>Public Hearings</i>
26.	PSAP Aset Non Lancar yang Diperuntukan untuk dijual dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan (IPSAS 44)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
27.	PSAP Pengukuran (IPSAS 46)	Penyusunan Kajian	<i>Drafting</i>
28.	PSAP Pendapatan (IPSAS 47)	Penyusunan Kajian	<i>Drafting</i>

Capaian Kinerja Tahun 2025

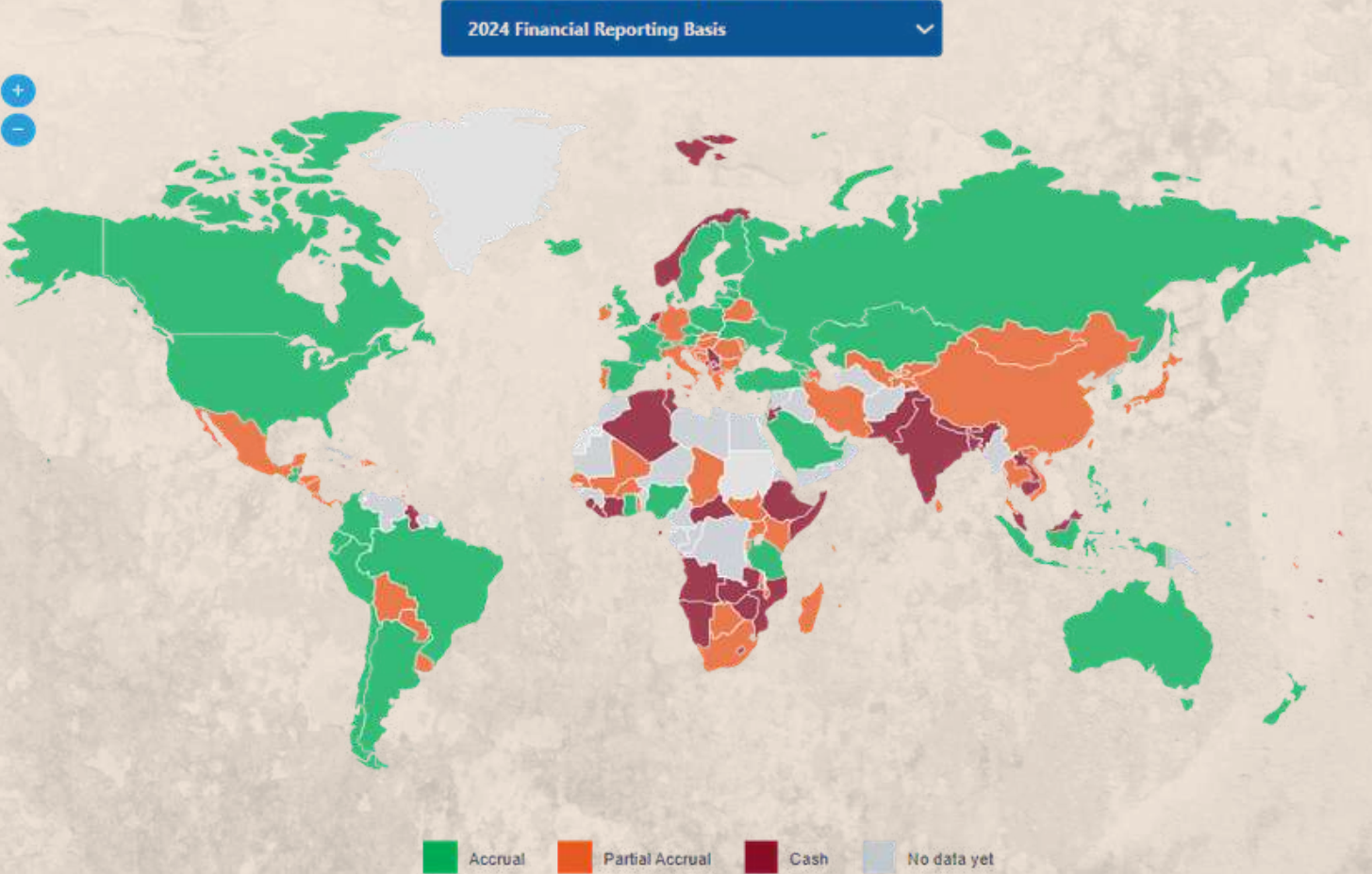
Perbandingan Target dan Capaian Penyusunan PSAP Tahun 2025

No	PSAP	Target	Capaian
29.	PSAP Beban Transfer (IPSAS 48)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
30.	PSAP Eksplorasi Sumber Daya Mineral (IPSAS 50)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
31.	PSAP Kombinasi Sektor Publik (IPSAS 40)	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia
32.	Laporan Keberlanjutan	Penyusunan Kajian	Telah disusun Kajian terkait praktik penerapan di negara lain dan analisis implementasinya di Indonesia

CIPFA Report

(The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy)

IFAC and CIPFA's International Public Sector Financial Accountability Index verifies and analyzes current financial reporting bases and frameworks used by federal and central governments around the world. An overview of public sector reporting trends is provided in the [2024 Global Adoption Status Snapshot](#).



	2024 Financial Reporting Basis	2024 Financial Reporting Framework	2030 Projected Financial Reporting Basis	2030 Projected Financial Reporting Framework	Published Accounts
Indonesia	■ Accrual	■ National standards with reference to IPSAS Standards	■ Accrual	■ National standards with reference to IPSAS Standards	Documents provided

06

Mengenal PSAP Baru

PSAP 20: Agrikultur

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 20: Agrikultur, terdiri dari 56 paragraf dilampiri dengan Dasar Kesimpulan dan Contoh Ilustrasi.

Tujuan

Tujuan dari pernyataan standar ini untuk **mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur.**

Definisi

Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan hasil panen dari suatu aset biologis yang dilakukan oleh entitas untuk:

- penjualan;
- distribusi tanpa atau dengan biaya; atau
- perubahan menjadi produk agrikultur atau menjadi tambahan aset biologis untuk dijual atau distribusi tanpa atau dengan biaya.

Produk agrikultur adalah hasil panen dari aset biologis entitas.

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang:

- digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
- diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari satu periode; dan
- memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang jarang terjadi.

Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup.

Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi dan sesuatu yang menghasilkan perubahan yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif suatu aset biologis.

Biaya penjualan adalah tambahan biaya yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Pelepasan dapat terjadi melalui distribusi tanpa atau dengan biaya.

Kelompok aset biologis adalah gabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa.

Panen adalah pelepasan produk agrikultur dari suatu aset biologis atau penghentian proses hidup aset biologis.

Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Ruang Lingkup

Pernyataan standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada laporan keuangan entitas pemerintah yang terkait dengan aktivitas agrikultur sebagaimana berikut:

- Aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plant*); dan
- Produk agrikultur pada saat dipanen

Tabel di bawah ini merupakan contoh aset biologis, produk agrikultur, tanaman produktif serta produk hasil olahan panen:

Hewan dan Tanaman		Produk Agrikultur	Produk hasil olahan Panen
Aset Biologis	Tanaman Produktif		
Domba	--	Wol	Benang, Kain
Sapi perah	--	Susu	Keju
Sapi potong	--	Daging potong	Sosis
Ikan	--	Daging ikan	Produk olahan ikan
Rumput Laut		Panen rumput laut	Agar-agar rumput laut
Tanaman tebu	--	Panen tebu	Gula
Tanaman padi	--	Gabah	Beras
Tanaman jagung	--	Buah Jagung	Olahan Jagung
Tanaman kedelai	--	Kedelai	Tempe, Tahu
--	Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
--	Tanaman teh	Daun teh	Teh
--	Tanaman anggur	Buah anggur	Minuman anggur
--	Pohon kelapa sawit	Tandan buah segar	Minyak kelapa sawit
--	Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet

PMK

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 20 Agrikultur.

PSAP 20: Agrikultur

Pengecualian

Pernyataan standar ini tidak diterapkan atas:

- a) tanah yang digunakan dalam aktivitas agrikultur;
- b) aset tidak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur;
- c) aset biologis yang habis pakai atau persediaan untuk layanan; dan
- d) aset hak guna yang muncul dari penyewaan tanah terkait dengan aktivitas agrikultur.

Pengakuan

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika:

- a) Entitas mengendalikan aset tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi jasa masa depan yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- c) Nilai wajar atau biaya perolehan atas aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

- Aset biologis diukur pada saat perolehan awal dan pada saat tanggal pelaporan sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali untuk kasus dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Jika nilai wajar dapat diukur dengan andal aset biologis diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan.
- Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis entitas diukur dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada saat panen. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar tersebut merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAP yang mengatur mengenai Persediaan.

Penetapan nilai wajar atas aset biologis atau produk agrikultur dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur berdasarkan atribut yang signifikan, sebagai contoh berdasarkan umur atau kualitas. Suatu entitas memilih atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar sebagai dasar penentuan harga.

Jika terdapat pasar aktif atas aset biologis atau produk agrikultur pada lokasi dan kondisi terkini, harga pasar yang dipakai adalah dasar penetapan harga pasar aset tersebut. Jika suatu entitas memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar aktif yang lain, entitas menggunakan harga yang paling relevan. Sebagai contoh, jika suatu entitas memiliki kesempatan untuk masuk ke dua pasar aktif, entitas akan menggunakan harga pasar yang diharapkan

Jika tidak terdapat pasar aktif atas aset biologis atau produk agrikultur, entitas menggunakan satu atau lebih pertimbangan berikut ini dalam penentuan harga wajarnya:

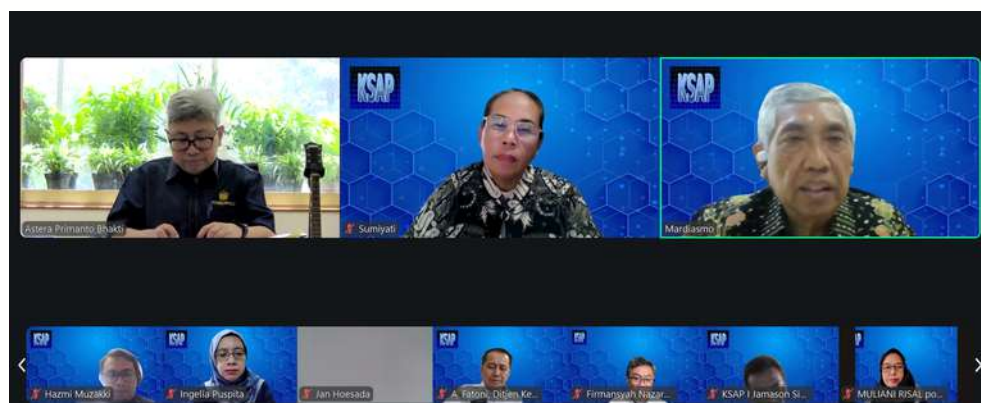
- a) Harga terbanyak pada transaksi di pasar saat ini, yang menginformasikan tidak ada perubahan yang berarti pada kondisi ekonomi di antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan;
- b) Harga pasar aset yang sama setelah penyesuaian untuk menggambarkan perbedaan; dan
- c) Tolok ukur sektor seperti nilai kebun yang digambarkan per keranjang ekspor, gantang atau hektar dan nilai ternak yang dinyatakan per kilogram daging.

Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2027.

Dokumentasi Kegiatan

Rapat Pleno Komite Konsultatif KSAP



Dokumentasi Kegiatan

Rapat Pleno Mingguan KSAP



Dokumentasi Kegiatan

Study Visit

General Court Of Audit (GCA) Saudi Arabia



Dokumentasi Kegiatan

Focus Group Discussion, Public Hearing & Sosialisasi



Dokumentasi Kegiatan

Training of Trainers (ToT) PSAP 18 & PSAP 19



Dokumentasi Kegiatan

Fasilitasi Kegiatan KSAP





**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gedung Prijadi Praptosuharjo III, Lantai 3
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat

sekretariat.ksap@gmail.com